LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

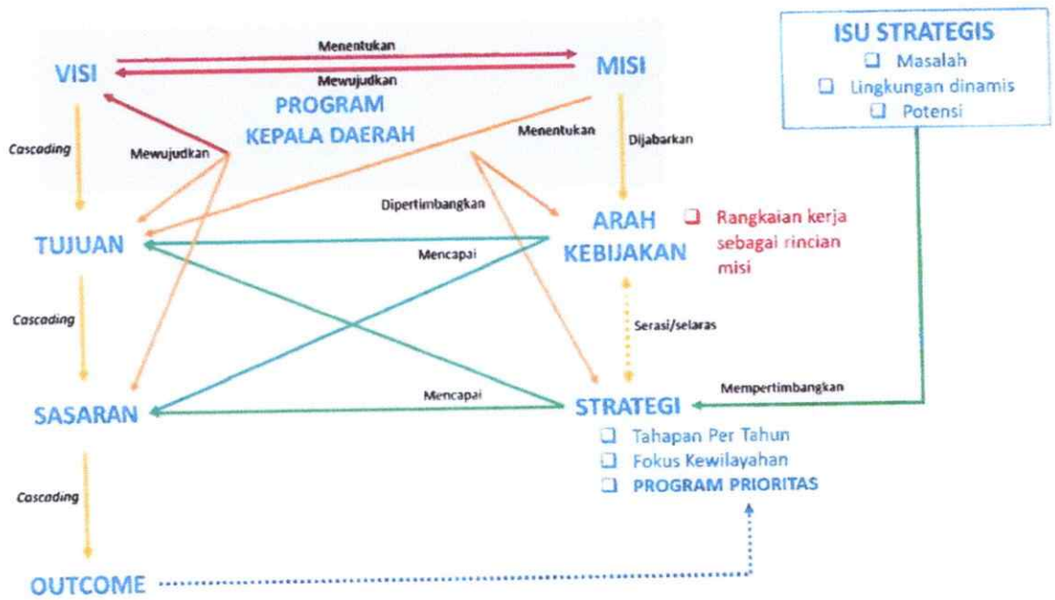
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan terbitnya Radiogram Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 Februari 2025, Nomor: 100.2.1.3/644/SJ Hal tentang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2025, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, akan dimulai penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan visi dan misi Bupati serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Gambar 1.1.
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : *Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025*

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan:

(a) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

(b) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024;

(c) Evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*;

(d) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

(e) Kebijakan Nasional;

(f) Regulasi yang berlaku; dan

(g) Saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Bagor dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Bagor Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Bagor Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868)
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2028 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini mengatur perubahan pada klasifikasi dan kodefikasi dalam perencanaan dan keuangan daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No,or 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 127);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentanng Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra 2025-2029 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
   a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
   b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
   c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
   d. Kelompok Sasaran Layanan.
2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
   a. Identifikasi Permasalahan ;
   b. Perumasan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
3.3. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Derah dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra
4.2. Uraian Program
4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU);
4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Data Geografis Batas Wilayah kecamatan Bagor

Batas wilayah Kecamatan Bagor, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rejoso, sebelah Selatan dengan Kecamatan Berbek, wilayah bagian timur Kecamatan Nganjuk dan barat berbatasan dengan Kecamatan Bagor. Luas wilayah Kecamatan Bagor kurang lebih 5.115,50 Ha.

Luas Wilayah Kecamatan Bagor Menurut Desa (km2)

No.	Desa	Luas (km2)	Persentase (%)
1	Balongrejo	11,55	22,46
2	Girirejo	2,14	4,10
3	Pesudukuh	1,57	3,13
4	Sekarputih	0,73	1,37
5	Buduran	1,27	2,54
6	Ngumpul	11,15	21,68
7	Bagor Kulon	2,09	4,10
8	Petak	0,92	1,76
9	Paron	1,06	2,15
10	Karangtengah	0,93	1,76
11	Selorejo	2,87	5,66
12	Gandu	1,90	3,71
13	Guyangan	0,48	0,98
14	Kedondong	0,86	1,76
15	Sugihwaras	1,10	2,15
16	Kutorejo	1,16	2,34
17	Kerepkidul	1,04	1,95
18	Gemenggeng	0,99	1,95
19	Kendalrejo	1,08	2,15
20	Banarankulon	3,78	7,42
21	Banaranwetan	2,51	4,88
	Kecamatan Bagor	51,16	100,00

Sumber : bps/statistik

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Bagor

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	BALONGREJO	2.134	2.159
2	GIRIREJO	1.987	1.880
3	PESUDUKUH	1.638	1.588
4	SEKARPUTIH	1.510	1.450
5	BUDURAN	865	890
6	NGUMPUL	3.009	2.909
7	BAGORKULON	2.181	2.149
8	PETAK	1.093	1.109
9	PARON	1.128	1.101
10	KARANGTENGAH	1.284	1.279
11	SELOREJO	2.886	2.850
12	GANDU	1.615	1.675
13	KEREPKIDUL	1.421	1.404
14	GUYANGAN	977	1.037
15	KEDONDONG	1.034	1.079
16	KUTOREJO	1.089	1.079
17	SUGIHWARAS	1.987	1.991
18	GEMENGGENG	1.541	1.508
19	KENDALREJO	1.138	1.099
20	BANARANWETAN	3.261	3.091
21	BANARANKULON	2.329	2.317
JUMLAH		**36.107**	**35.652**

Sumber data : Profil Kependudukan Kecamatan Bagor Tahun 2024

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsisampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentangstruktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkanorganisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,prosedur, mekanisme).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Bagor.

1. Tugas Pokok

   Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat Bagor Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

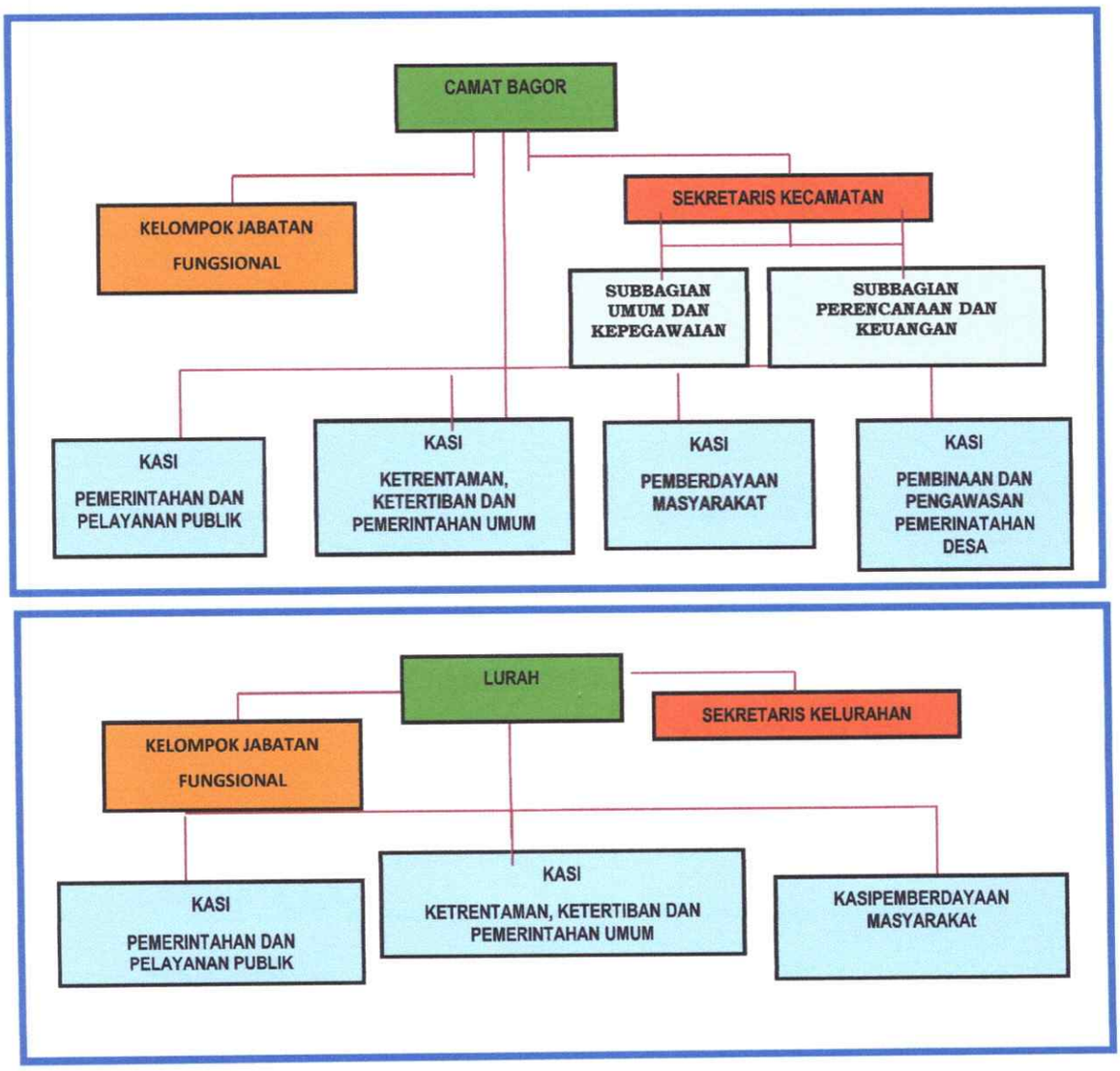
   a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
   b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
   c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
   e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.
   f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
   g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada
   h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
   i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desah

3. Struktur organisasi

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk ditetapkan tugas Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat Bagor Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi. Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;

b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3) Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5) Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6) Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7) Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
9) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2) Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4) Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6) Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

3) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
7) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
11) Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

1) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6) Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

7) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2) Pemberdayaan masyarakat;
3) Pelayanan masyarakat;
4) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan

ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
b) Pengelolaan urusan keuangan;
c) Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d) Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan;
b) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
c) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
d) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
b) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah kerja kelurahan;
c) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
d) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan
e) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

a) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kelurahan;

c) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

e) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

f) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

h) Melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Kecamatan Bagor

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Bagor adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor

Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	0
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	0
5.	Kepala Kelurahan	2
6.	Sekretaris Kelurahan	1
7.	Kepala Seksi Kelurahan	3
5.	Staf/PNS	7
6.	Non ASN	12
Jumlah		30

Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.4

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	3
2.	S1	7
3.	D3	0
4.	SMA	7
5.	SMP	0
JUMLAH		17

Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.2.2 Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Bagor sebanyak 9 (sembilan)

Tabel 2.2

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	0
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	0
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	0
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1

7.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1
8.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pem Desa	1
9.	Lurah Kedondong	0
10.	Sekretaris Lurah	1
11.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0
13.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0
14.	Lurah Guyangan	1
15.	Sekretaris Lurah	1
16.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
17.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0
18.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1
Jumlah		11

Sumber Data : Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.2.4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Bagor dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bagor dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.5. dan Tabel 2.6. dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai SAKIP Kecamatan				66	68	70	N/A	50.42	60.85	73.35	N/A	76	89	104	N/A
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan				84	86	88	90	100	100	100	91,66	119,04	116,27	113	101,84
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				84	86	88	90	100	100	100	85,71	119,04	116,27	90,90	95,23
4	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan				84	86	88	90	100	100	100	100	119,04	116,27	113	100
5	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan				84	86	88	90	100	100	100	100	119,04	116,27	113	100
6	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				84	86	88	100	81	81	81	100	119,04	116,27	81	100

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 202

Tabel 2.6.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)			(5)	(6)			(9)	(10)			(13)	(14)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.271.887.854	3.595.134.650	3.690.746.460	4.124.695.534	2.864.630.400	3.025.664.248	2.864.883.924	3.401.644.739	87.55	84.16	77.62	82.47
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119.228.450	415.097.212	208.520.350	54.749.300	117.277.872	387.717.236	180.847.150	50.557.500	93.36	93.40	86.73	92.34
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	108.760.400	1.219.434.250	1.259.788.940	233.144.500	104.492.300	1.209.896.500	1.239.013.776	211.355.000	96.08	98	97	90.47
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	151.861.250	194.540.014	134.425.250	94.447.000	150.963.000	182.980.164	122.495.750	87.814.000	99.41	94.06	91.13	92.98
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.925.100	5.150.100	60.386.600	122.500.250	1.809.000	4.950.250	60.277.200	109.266.760	94.02	96.12	99.82	89.20
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.326.850	330.495.200	29.751.350	74.868.300	9.300.400	286.183.500	28.067.950	54.288.250	90.06	86.59	94.34	72.51

Sumber: LRA Kecamatan Bagor Tahun 2021-2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.6., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Bagor.

Sedangkan pada table 2.7, kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2021-2022, rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban adalah sebesar 47,20 dengan predikat Sangat Rendah. Hal ini terjadi pada masa awal COVID- 2019, dimana berbagai kegiatan banyak yang dilakukan pembatalan atau tidak dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dan mencegah adanya penularan COVID-2019. Namun pada tahun 2023-2024 realisasi mulai stabil.

DATA DAN INFORMASI

Penjelasan Metadata Terkait Indikator Kinerja

Berdasarkan tabel 2.6 diatas, dapat kita lihat bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Bagor tahun anggaran 2024 diprioritaskan pada bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian program dan pencapaiannya sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kecamatan

SAKIP Kecamatan dengan target Nilai 75,00 dan terealisasi sebesar Nilai 71.40. Sehingga kinerja tahun 2024 dapat mencapai 95,2%. Terdapat beberapa realisasi mulai dari dokumen, laporan dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Tahun 2024.

Formulasi perhitungan dari capaian tersebut ialah dari nilai SAKIP Kecamatan yang diperoleh dari tim penilai SAKIP yakni sebesar 71.40 (BB). Berdasarkan catatan tim penilai SAKIP, salah satu upaya yang dapat diperbaiki antara lain; Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) harus memenuhi kriteria SMART, dimana salah satunya adalah "measurable" atau jelas dan dapat diukur. Target indikator kinerja tahun 2023 pada Renstra adalah "baik", tidak berupa angka sehingga sulit diukur.

Hal kompleks yang menjadi pendorong keberhasilan dari program ini ialah adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Sedangkan salah satu faktor penghambatnya jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu, ini dapat menghambat kinerja organisasi perangkat daerah.

2. Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan target kinerja 95% terealisasi sebesar 95% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan dari program ini ialah persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana.

Empat kegiatan yang dilaksanakan ialah pelaksanaan intensifikasi PBB; evaluasi PBB; sosialisasi DTKS; serta pelaksanaan sosialisasi dibidang kependudukan.

Keberhasilan dari program ini disebabkan karena melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan. Sedangkan faktor penghambat kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggungjawab berbagai instansi atas unit kerja dapat menghambat koordinasi. Upaya untuk terus mempertahankan capaian tersebut ialah mengimplementasikan dan terus perbarui sistem informasi terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja secara *real-time*.

3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan target 95% dan terealisasi sebesar 95%, sehingga diperoleh tingkat capaiannya sebesar 100% dengan formulasi perhitungan dari persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan Bagor.

Tingkat keberhasilan diperoleh dari pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan dan faktor penghambat ialah persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama. Upaya untuk meningkatkan capaian program ini ialah menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi perangkat desa/kelurahan serta masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, baik dalam bidang teknis maupun manajerial.

Dalam program ini hanya memuat satu kegiatan yakni koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tercapai 100%. Hal ini dikarenakan tercapainya jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan Bagor.

4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan target 95% dan terealisasi sebesar 95%. Formulasi perhitungan dari program ini adalah persentase permasalahan trantibum yang dikoordinasikan penanganannya dengan Forkopimcam serta Toga/Tomas. Pada program ini juga terdapat satu kegiatan yakni koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Pada tahun 2024, capain kegiatan tersebut sebesar 1 laporan dari target 1 laporan, berupa laporan trantibum selama satu tahun. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program dan kegiatan ini dapat meningkatkan efektivitasnya sehingga hal ini dapat mmenjadi faktor pendorong tercapainya program ini. Namun juga terdapat faktor penghambat yakni Kolaborasi yang kurang baik antara instansi-instansi terkait. Upaya yang dapat dilakukan agar kegiatan tersebut dapat terus mencapai target ialah meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan (Polri, TNI, Satpol PP), pemerintah daerah, dan lembaga terkait melalui forum rutin, rapat koordinasi, dan penyusunan mekanisme kerja Bersama.

5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target sebesar 95% terealisasi sebesar 95%. Formulasi perhitungan program ini adalah persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Program ini digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dengan indikator kegiatan yakni jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Capaian pada tahun ini ialah 4 lembaga/organisasi masyarakat dari target 4 lembaga/organisasi masyarakat. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk terus meningkatkan kegiatan ini adalah menyusun

rencana kerja tahunan yang terintegrasi dengan visi dan misi daerah serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan.

Faktor pendorong pada program ini ialah pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut dan faktor penghambatnya ialah keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab.

6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan target dan realisasi sebesar 95%. Indikator program ini ialah persentase desa cepat berkembang.

Program ini digunakan untuk kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mempunyai indikator jumlah desa cepat berkembang. Pada tahun ini capaian kegiatan ini sebesar 19 desa dengan target 19 desa. Upaya untuk mencapai hal tersebut ialah mlaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan. Faktor pendorong yang dapat diambil ialah Pelatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten dan Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah kelompok masyarakat, organisasi, atau entitas lain yang menjadi target utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan oleh suatu instansi atau lembaga dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun). Kelompok sasaran ini ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Renstra tersebut, serta relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di KecBagor

No	Desa	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	PerPustakaan
1	BALONGREJO	1/1	2	1/0	-	-	-	-	-	1
2	GIRIREJO	1/1	2/1		-	-	-	-	-	
3	PESUDUKUH	1/1	1	-	-	-	-	-	-	1
4	SEKARPUTIH	1/1	1		1/0		1			1
5	BUDURAN	1/1	2	-	-	-	-	-	-	1
6	NGUMPUL	1/1	2	-	-	-	-	-	-	1
7	BAGORKULON	1/1	2	0/1	0/1	-	-	-	-	
8	PETAK	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-	1
9	PARON	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	1
10	KARANGTENGAH	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-	1
11	SELOREJO	1/1	2/0	-	-	-	-	-	-	1
12	GANDU	1/1	1/1	-	-	-	-	-	-	1
13	KEREPKIDUL	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	1
14	SUGIHWARAS	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	-
15	KUTOREJO	1/1	1/1	0/1		-	1	-	-	1
16	GEMENGGENG	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	1
17	KENDALREJO	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	-
18	BANARANWETAN	1/1	2/0	-	-	-	1	-	-	1
19	BANARANKULON	1/1	2/0	1/0	-	-	-	-	-	-
20	KEDONDONG	1/1	1/0	-	-	-	-	-	-	-
21	GUYANGAN	1/1	1/0	-	-	-	1	-	-	-

Sumber Data : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bagor

No	Desa	Rumah Sakit	PKM	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	BALONGREJO	-	-	-	-	1	-
2	GIRIREJO	-	-	1. GIRI HUSADA 2. AMANAH KELUARGA	-	-	-
3	PESUDUKUH	-	-	-	1	-	-
4	SEKARPUTIH	-	-	-	-	1	-
5	BUDURAN	-	-	-	-	1	
6	NGUMPUL	-	-	-	-	1	-
7	BAGORKULON	-	-	-	-	1	-
8	PETAK	-	1	-	-	-	3
9	PARON	-	-	-	-	-	-
10	KARANGTENGAH	-	-	AL-MIRA	-	1	-
11	SELOREJO	-	-	SAFIRA	-	1	-
12	GANDU	-	-	-	-	1	-
13	KEREPKIDUL	-	-	-	-	1	3
14	SUGIHWARAS	-	-	-	-	1	-
15	KUTOREJO	-	-	-	-	1	-
16	GEMENGGENG	-	-	-	-	1	-
17	KENDALREJO	-	-	-	-		-
18	BANARANWETAN	-	-	-	1	1	-
19	BANARANKULON	-	-	-	-	2	-
20	KEDONDONG	-	-	SAHABAT KELUARGA	-	1	-
21	GUYANGAN	-	-	-	-	1	1

Sumber Data : Kepala Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Bagor

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	BALONGREJO	24	7	11	10	2	30	1 Pleton
2	GIRIREJO	42	2	9	13	2	29	1 Pleton
3	PESUDUKUH	23	6	6	10	2	14	1 Pleton
4	SEKARPUTIH	12	6	9	12	2	18	1 Pleton
5	BUDURAN	15	7	5	13	2	49	1 Pleton
6	NGUMPUL	27	14	9	13	2	18	1 Pleton
7	KARANGTENGAH	12	4	7	13	2	12	1 Pleton
8	SELOREJO	41	5	11	11	2	11	1 Pleton
9	GANDU	28	9	7	8	2	22	1 Pleton
10	BAGORKULON	32	7	7	11	2	14	1 Pleton
11	PETAK	11	4	6	11	2	10	1 Pleton
12	PARON	6	21	5	13	2	24	1 Pleton
13	GUYANGAN	18	4	0	8	2	14	1 Pleton
14	KEDONDONG	16	4	0	8	2	14	1 Pleton
15	SUGIHWARAS	30	4	9	11	2	14	1 Pleton
16	KUTOREJO	13	4	7	11	2	10	1 Pleton
17	KEREPKIDUL	17	6	6	11	2	18	1 Pleton
18	GEMENGGENG	27	9	12	12	2	23	1 Pleton
19	KENDALREJO	14	6	7	12	2	14	1 Pleton
20	BANARANWETAN	54	12	9	9	2	16	1 Pleton
21	BANARANKULON	24	4	9	9	2	14	1 Pleton

Sumber Data : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Bagor

No	Desa	BUM Desa	Bum Des ma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM
1	BALONGREJO	Walonggalu Makmur	-	-	-	SRIKANDI	1
2	GIRIREJO	Giri Makmur Sejahtera	-	Ps. Teleng	-	WIJOYO KUSUMO	1
3	PESUDUKUH	Sumber Rejeki	-	-	-	IBUNDA	1
4	SEKARPUTIH	Sekarjaya	-	-	-	SEKAR MULIA	1
5	BUDURAN	Sejahtera	-	-	-	MELATI	1
6	NGUMPUL	Ngumpul Makmur	-	-	-	DANA MULIA	1
7	BAGORKULON	Punggul Semar	-	-	-	SRIKANDI	1
8	PETAK	Petak Damai	-	Ps. Bagor	KSP TAM	KECANA PUTIH	1
9	PARON	Mbun Jolondriyo	-	-		SRIKANDI	1
10	KARANGTENGAH	Karangtengah Gemilang	-	-		SRI REJEKI	1
11	SELOREJO	Bumdesa Peduli	-	-	KSP Artha Pundi	SEKAR SARI	1
12	GANDU	Arta Sejahtera	-	-	-	GUYUB RUKUN	1
13	KEREPKIDUL	Bahtera Jaya	-	Ps. Kerepkidul	-	MAWAR	1
14	SUGIHWARAS	Cahaya Kita	-	-	-	MELATI	1
15	KUTOREJO	Sri Rejeki Kutorejo	-	-	-	NUSA INDAH	1
16	GEMENGGENG	Karya Agung	-	Ps. Tawang	-	MEKAR JAYA	1
17	KENDALREJO	Margo Utomo	-	-	-	NGUDI REJEKI	1
18	BANARANWETAN	Sumber Makmur	-	-	-	BOUGENVILLE	1
19	BANARANKULON	Sejahtera	-	-	-	SEROJA	1
20	KEDONDONG	-	-	Ps. Hewan	-	ANGGREK	1
21	GUYANGAN	-	-	-	KSP Karya Agung KSP Arta Kencana	MELATI	1

Sumber Data : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Bagor Tahun 2024

No	desa	anjal/ gepeng	minuman beralkohol	galian minerba	penertiban reklame	penertiban pkl	perkelahian
1	BALONGREJO	-	-	-	-	-	-
2	GIRIREJO	-	-	-	-	-	-
3	PESUDUKUH	-	-	-	-	-	-
4	SEKARPUTIH	-	-	-	-	-	-
5	BUDURAN	-	-	-	-	-	-
6	NGUMPUL	-	-	-	-	-	-
7	BAGORKULON	-	-	-	-	-	-
8	PETAK	-	-	-	-	-	-
9	PARON	-	-	-	-	-	-
10	KARANGTENGAH	-	-	-	-	-	-
11	SELOREJO	-	-	-	-	-	-
12	GANDU	-	-	-	-	-	-
13	KEREPKIDUL	√	√	-	-	-	-
14	SUGIHWARAS	-	-	-	-	-	-
15	KUTOREJO	-	-	-	-	-	-
16	GEMENGGENG	-	-	-	-	-	-
17	KENDALREJO	-	-	-	-	-	-
18	BANARANWETAN	-	-	-	-	-	-
19	BANARANKULON	-	-	-	-	-	-
20	KEDONDONG	-	√	-	-	-	-
21	GUYANGAN	√	√	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Bagor Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec.Bagor
	NIHIL	

Sumber Data : Kepala Seksi Trantibum dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Bagor Tahun 2024.

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKP Desa (Jumlah Dokumen)	APB Desa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1	BALONGREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
2	GIRIREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
3	PESUDUKUH	1	1	1	1	1	1	1	1
4	SEKARPUTIH	1	1	1	1	1	1	1	1
5	BUDURAN	1	1	1	1	1	1	1	1
6	NGUMPUL	1	1	1	1	1	1	1	1
7	BAGORKULON	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PETAK	1	1	1	1	1	1	1	1
9	PARON	1	1	1	1	1	1	1	1
10	KARANGTENGAH	1	1	1	1	1	1	1	1
11	SELOREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
12	GANDU	1	1	1	1	1	1	1	1
13	KEREPKIDUL	1	1	1	1	1	1	1	1
14	SUGIHWARAS	1	1	1	1	1	1	1	1
15	KUTOREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
16	GEMENGGENG	1	1	1	1	1	1	1	1
17	KENDALREJO	1	1	1	1	1	1	1	1
18	BANARANWETAN	1	1	1	1	1	1	1	1
19	BANARANKULON	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber Data : Kepala Seksi Binwas

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Bagor Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1.	Adminduk Capil (SEDUDO)	Ada
2.	Perijinan IMB	Ada
3.	Surat Keterangan Waris	Ada
4.	Dispensasi Nikah	Ada
5.	Entry data Miskin Subsidi Listrik	Ada
6.	Izin Keramaian	Ada
7.	SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)	Ada

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Penlayanan publik

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Bagor Tahun 2024

No	Jenis pelayanan	Tahun 2024
1	Kecamatan Sehat	Ada
2	Kecamatan Layak Anak	Ada
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	Ada
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Ada
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	Ada
6	Penanggulangan Kemiskinan	Ada

Sumber Data : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan publik

2.2. Subbab Permalasahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bagor menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Bagor;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Bagor yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bagor, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Visi Misi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Nganjuk

Tahun 2021-2045, Kecamatan Bagor memberikan dukungan dalam penataan ruang daerah melalui kegiatan Pengembangan Kawasan.

b. Perumusan Isu-isu Strategis

Pada Subbab Identifikasi Permasalahan sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Bagor, yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Bagor, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Bagor guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

5) Keamanan dan Ketertiban di Wilayah

Masih tingginya angka kriminalitas dan masih rendahnya keterlibatan semua pihak baik masyarakat, polisi, dan kecamatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan menjadi faktor penting untuk menurunkan angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Tabel 2.1

Teknik Menyimpulan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENAGNA PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU DTRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Meningkatnya Kinerja Birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan yang aspiratif dan transparan	Peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Ketahanan terhadap peubahan iklim, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konflik Kesenjangan, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasikan dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosokan ekonomi global	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, pengembangan insfrastruktur dan digitali desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Pangan, pengelolaan Lingkungan, pencegahan dan penanganan stunting serta Penguatan BUMDes yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Insfrastruktur antarwilayah, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal	• Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. • Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. • Pelayanan Prima. • Peningkatan Sinergitas Kecamatan. • Keamanan dan Ketertiban di Wilayah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Visi RPJMD Kabpaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan kabupaten nganjuk yang maju, sejahtera dan bermartabat. dalam mencapai visi dimaksud dijabarkan menjadi 7 misi. kecamatan Bagor mengampu misi ke 2 yaitu meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat kabupetan nganjuk yang efekttif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan. visi dan misi dimaksud di jabarkan melalui tujuan RPJMD terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik. sejalan dengan tujuan RPJMD, kecamatan Bagor mendukung sasaran RPJMD meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan Kecamatan Bagor adalah meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, yang diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu berupa indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1. berikut:

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor											
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	63,52	75	75	80	83	87	87	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	85,42	86	86	87	88	89	90	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan g angguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)	27	15	15	14	13	12	11	
		Meningkatnya tertib administrasi Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa (%)	71	80	80	85	90	95	100	

3.2. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD 2025-2029

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Bagor dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Bagor, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
3. Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
8. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah

10. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
12. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM
13. Meningkatkan Inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek.

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPJMD : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan daerah yang Akuntabel			
Sasaran RPJMD : Meningkatkan Birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan publik yang prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	▪ Meningkatkan pelayanan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berkualitas ▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah ▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa.	▪ Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah ▪ Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB

			▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ▪ Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM ▪ Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	▪ Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah	▪ Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa	▪ Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	▪ Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT"

Kecamatan Bagor sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi. Maka Kecamatan Bagor mendukung misi

ke-2 yakni **"Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan"**, dengan Program Unggulan Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local;
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;
7. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local.

Sedangkan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati, antara lain :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren

6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Kecamatan Bagor sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kecamatan Bagor dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua) yakni Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Bagor memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Bagor selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Bagor. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Bagor akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Bagor		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Bagor		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bagor		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Bagor	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)		
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bagor		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Bagor		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bagor		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Desa			Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		
			Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Bagor		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bagor		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Kedondong							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersediannya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Guyangan							
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan				Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersediannya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

TABEL 4. 2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					8.319.558.689,00		8.788.322.010,00		8.402.934.694,00		8.600.692.927,00		8.600.692.927,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.487.056.667,00		7.019.553.310,00		6.622.155.994,00		6.802.914.227,00		6.802.914.227,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	73,35	73,35	74	6.487.056.667,00	75	7.019.553.310,00	76	6.622.155.994,00	77	6.802.914.227,00	78	6.802.914.227,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71,40	74	74		75		76		77		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71,40	74	74		75		76		77		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					133.425.000,00		187.471.700,00		187.481.700,00		187.481.700,00		187.481.700,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	95	95	100	43.275.000,00	100	120.659.100,00	100	120.669.100,00	100	120.669.100,00	100	120.669.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	95	95	100	26.000.000,00	100	17.220.000,00	100	17.220.000,00	100	17.220.000,00	100	17.220.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	95	95	100	64.150.000,00	100	49.592.600,00	100	49.592.600,00	100	49.592.600,00	100	49.592.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.117.091.022,00		1.221.882.000,00		1.223.882.000,00		1.225.882.000,00		1.225.882.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	100	1.117.091.022,00	100	1.221.882.000,00	100	1.223.882.000,00	100	1.225.882.000,00	100	1.225.882.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	95	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					90.125.000,00		102.675.000,00		102.675.000,00		102.675.000,00		102.675.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	95	95	100	50.125.000,00	100	62.675.000,00	100	62.675.000,00	100	62.675.000,00	100	62.675.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	95	95	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					402.951.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	95	95	100	402.951.000,00	100	170.000.000,00	100	180.000.000,00	100	195.000.000,00	100	195.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					88.910.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00	
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Bagor	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	95	95	100	45.660.000,00	100	50.415.000,00	100	50.415.000,00	100	50.415.000,00	100	50.415.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bagor	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	95	95	100	43.250.000,00	100	36.325.000,00	100	36.325.000,00	100	36.325.000,00	100	36.325.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					8319558689.00		8788322010.00		8402934694.00		8600692927.00		8600692927.00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				8.319.558.689,00		8.788.322.010,00		8.402.934.694,00		8.600.692.927,00		8.600.692.927,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.487.056.667,00		7.019.553.310,00		6.622.155.994,00		6.802.914.227,00		6.802.914.227,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	73,35	74	6.487.056.667,00	75	7.019.553.310,00	76	6.622.155.994,00	77	6.802.914.227,00	78	6.802.914.227,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Bagor	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.568.000,00		9.075.000,00		9.982.500,00		10.980.750,00		10.980.750,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Substansi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	8.568.000,00	4	9.075.000,00	4	9.982.500,00	4	10.980.750,00	4	10.980.750,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.568.000,00		9.075.000,00		9.982.500,00		10.980.750,00		10.980.750,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	8.568.000,00	4	9.075.000,00	4	9.982.500,00	4	10.980.750,00	4	10.980.750,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.689.335.000,00		4.840.287.470,00		4.985.836.094,00		5.135.721.177,00		5.135.721.177,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25	4.677.929.000,00	25	4.818.287.470,00	25	4.962.836.094,00	25	5.111.721.177,00	25	5.111.721.177,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.677.929.000,00		4.818.287.470,00		4.962.836.094,00		5.111.721.177,00		5.111.721.177,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25	4.677.929.000,00	25	4.818.287.470,00	25	4.962.836.094,00	25	5.111.721.177,00	25	5.111.721.177,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	11.406.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.838.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.838.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				8.568.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	8.568.000,00	18	12.000.000,00	18	13.000.000,00	18	14.000.000,00	18	14.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				29.361.600,00		145.148.400,00		158.148.400,00		170.148.400,00		170.148.400,00		
Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	25	29.361.600,00	25	145.148.400,00	25	158.148.400,00	25	170.148.400,00	25	170.148.400,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				16.650.000,00		33.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	16.650.000,00	1	33.000.000,00	1	45.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12.711.600,00		112.148.400,00		113.148.400,00		115.148.400,00		115.148.400,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	25	12.711.600,00	25	112.148.400,00	25	113.148.400,00	25	115.148.400,00	25	115.148.400,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				159.127.757,00		242.518.940,00		259.665.500,00		271.752.950,00		271.752.950,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran Yang Layak Pakai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	112.527.757,00	4	147.718.940,00	4	154.865.500,00	4	156.165.500,00	4	156.165.500,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.678.000,00		6.200.000,00		6.500.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	5.678.000,00	4	6.200.000,00	4	6.500.000,00	4	6.800.000,00	4	6.800.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				95.066.010,00		118.475.940,00		125.322.500,00		126.322.500,00		126.322.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	95.066.010,00	4	118.475.940,00	4	125.322.500,00	4	126.322.500,00	4	126.322.500,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.783.747,00		23.043.000,00		23.043.000,00		23.043.000,00		23.043.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	11.783.747,00	12	23.043.000,00	12	23.043.000,00	12	23.043.000,00	12	23.043.000,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran yang tepat waktu dan akurat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	46.600.000,00	4	94.800.000,00	4	104.800.000,00	4	115.587.450,00	4	115.587.450,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30		30		30		30		30			
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00		4.800.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.000.000,00	12	4.800.000,00	12	4.800.000,00	12	4.800.000,00	12	4.800.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.350.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30	42.350.000,00	30	80.000.000,00	30	90.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.250.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.787.450,00		10.787.450,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	4	1.250.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.787.450,00	4	10.787.450,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				215.482.563,00		145.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0	215.482.563,00	17	145.000.000,00	17	170.000.000,00	17	175.000.000,00	17	175.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0	0,00	17	70.000.000,00	17	70.000.000,00	17	70.000.000,00	17	70.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				215.482.563,00		75.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	10	215.482.563,00	10	75.000.000,00	10	100.000.000,00	10	105.000.000,00	10	105.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172.110.000,00		213.964.400,00		214.964.400,00		214.964.400,00		214.964.400,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	172.110.000,00	4	213.964.400,00	4	214.964.400,00	4	214.964.400,00	4	214.964.400,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.150.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	3.150.000,00	4	4.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				43.200.000,00		51.028.000,00		51.028.000,00		51.028.000,00		51.028.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	43.200.000,00	12	51.028.000,00	12	51.028.000,00	12	51.028.000,00	12	51.028.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				125.760.000,00		158.936.400,00		158.936.400,00		158.936.400,00		158.936.400,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	125.760.000,00	12	158.936.400,00	12	158.936.400,00	12	158.936.400,00	12	158.936.400,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				126.824.200,00		198.219.000,00		195.219.000,00		195.219.000,00		195.219.000,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	126.824.200,00	1	198.219.000,00	1	195.219.000,00	1	195.219.000,00	1	195.219.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				57.884.200,00		70.219.000,00		67.219.000,00		67.219.000,00		67.219.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	57.884.200,00	3	70.219.000,00	3	67.219.000,00	3	67.219.000,00	3	67.219.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	26	26	10.000.000,00	26	20.000.000,00	26	20.000.000,00	26	20.000.000,00	26	20.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				24.940.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	24.940.000,00	20	28.000.000,00	20	28.000.000,00	20	28.000.000,00	20	28.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				34.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	34.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71,40	74	6.487.056.667,00	75	7.019.553.310,00	76	6.622.155.994,00	77	6.802.914.227,00	78	6.802.914.227,00	7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Kedondong	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.780.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	11.780.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		30.000.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11.780.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	11.780.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		30.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				57.781.400,00		65.557.500,00		65.557.500,00		65.557.500,00		65.557.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	46.241.400,00	4	52.557.500,00	4	52.557.500,00	4	52.557.500,00	4	52.557.500,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.093.900,00		2.050.000,00		2.050.000,00		2.050.000,00		2.050.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	1.093.900,00	4	2.050.000,00	4	2.050.000,00	4	2.050.000,00	4	2.050.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.886.300,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	40.886.300,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.261.200,00		5.507.500,00		5.507.500,00		5.507.500,00		5.507.500,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4.261.200,00	4	5.507.500,00	4	5.507.500,00	4	5.507.500,00	4	5.507.500,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	11.540.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.540.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	8.540.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				344.993.253,00		375.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	344.993.253,00	4	375.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000,00		300.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				16.342.530,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	7	16.342.530,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.650.723,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	28.650.723,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.816.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Tersediannya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	87.816.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.400.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	8.400.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				79.416.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	79.416.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37.800.550,00		48.612.550,00		48.612.550,00		48.612.550,00		48.612.550,00		
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	4	37.800.550,00	4	48.612.550,00	4	48.612.550,00	4	48.612.550,00	4	48.612.550,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.400.550,00		28.212.550,00		26.212.550,00		26.212.550,00		26.212.550,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	4	23.400.550,00	4	28.212.550,00	4	26.212.550,00	4	26.212.550,00	4	26.212.550,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.800.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6	6	1.800.000,00	6	2.400.000,00	6	2.400.000,00	6	2.400.000,00	6	2.400.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	3.000.000,00	7	3.000.000,00	7	3.000.000,00	7	3.000.000,00	7	3.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.600.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	9.600.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	71,40	74	6.487.056.667,00	75	7.019.553.310,00	76	6.622.155.994,00	77	6.802.914.227,00	78	6.802.914.227,00	7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Guyangan	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.780.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	11.780.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				11.780.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	11.780.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				60.211.573,00		65.557.500,00		65.557.500,00		65.557.500,00		65.557.500,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	48.671.573,00	4	52.557.500,00	4	52.557.500,00	4	52.557.500,00	4	52.557.500,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.093.900,00		2.050.000,00		2.050.000,00		2.050.000,00		2.050.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	1.093.900,00	4	2.050.000,00	4	2.050.000,00	4	2.050.000,00	4	2.050.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4.257.923,00		5.507.500,00		5.507.500,00		5.507.500,00		5.507.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4.257.923,00	4	5.507.500,00	4	5.507.500,00	4	5.507.500,00	4	5.507.500,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				43.319.750,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	43.319.750,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	11.540.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.540.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	8.540.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				349.438.221,00		375.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4	349.438.221,00	7	375.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		0		0			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000,00		300.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.651.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4	15.651.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				33.787.221,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	7	33.787.221,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.096.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Tersediannya Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	87.096.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				7.680.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	7.680.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				79.416.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	79.416.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				37.550.550,00		45.612.550,00		48.612.550,00		49.400.000,00		49.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	37.550.550,00	3	45.612.550,00	3	48.612.550,00	3	49.400.000,00	3	49.400.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8		10		10		10		10			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6	6		8		8		8		8			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23.250.550,00		25.212.550,00		28.212.550,00		29.000.000,00		29.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	23.250.550,00	3	25.212.550,00	3	28.212.550,00	3	29.000.000,00	3	29.000.000,00		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.800.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6	6	1.800.000,00	8	2.400.000,00	8	2.400.000,00	8	2.400.000,00	8	2.400.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.900.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8	2.900.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10	3.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				9.600.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	9.600.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				133.425.000,00		187.471.700,00		187.481.700,00		187.481.700,00		187.481.700,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	95	100	26.000.000,00	100	17.220.000,00	100	17.220.000,00	100	17.220.000,00	100	17.220.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				26.000.000,00		17.220.000,00		17.220.000,00		17.220.000,00		17.220.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	26.000.000,00	12	17.220.000,00	12	17.220.000,00	12	17.220.000,00	12	17.220.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				26.000.000,00		17.220.000,00		17.220.000,00		17.220.000,00		17.220.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	26.000.000,00	12	17.220.000,00	12	17.220.000,00	12	17.220.000,00	12	17.220.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	95	100	64.150.000,00	100	49.592.600,00	100	49.592.600,00	100	49.592.600,00	100	49.592.600,00		
7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				64.150.000,00		49.592.600,00		49.592.600,00		49.592.600,00		49.592.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	12	12	64.150.000,00	12	49.592.600,00	12	49.592.600,00	12	49.592.600,00	12	49.592.600,00		
7.01.02.2.03.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				64.150.000,00		49.592.600,00		49.592.600,00		49.592.600,00		49.592.600,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	12	12	64.150.000,00	12	49.592.600,00	12	49.592.600,00	12	49.592.600,00	12	49.592.600,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	95	100	43.275.000,00	100	120.659.100,00	100	120.669.100,00	100	120.669.100,00	100	120.669.100,00		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				43.275.000,00		120.659.100,00		120.669.100,00		120.669.100,00		120.669.100,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	12	43.275.000,00	12	120.659.100,00	12	120.669.100,00	12	120.669.100,00	12	120.669.100,00		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				43.275.000,00		120.659.100,00		120.669.100,00		120.669.100,00		120.669.100,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	12	43.275.000,00	12	120.659.100,00	12	120.669.100,00	12	120.669.100,00	12	120.669.100,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.117.091.022,00		1.221.882.000,00		1.223.882.000,00		1.225.882.000,00		1.225.882.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	100	1.117.091.022,00	100	1.221.882.000,00	100	1.223.882.000,00	100	1.225.882.000,00	100	1.225.882.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				130.800.000,00		121.882.000,00		123.882.000,00		125.882.000,00		125.882.000,00		
Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Bagor	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6	6	130.800.000,00	6	121.882.000,00	6	123.882.000,00	6	125.882.000,00	6	125.882.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	21	21		21		21		21		21			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				21.425.000,00		20.882.000,00		20.882.000,00		20.882.000,00		20.882.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	21	21	21.425.000,00	21	20.882.000,00	21	20.882.000,00	21	20.882.000,00	21	20.882.000,00		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				104.375.000,00		95.000.000,00		96.000.000,00		98.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6	6	104.375.000,00	6	95.000.000,00	6	96.000.000,00	6	98.000.000,00	6	100.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	5.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	100	1.117.091.022,00	100	1.221.882.000,00	100	1.223.882.000,00	100	1.225.882.000,00	100	1.225.882.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Kedondong	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				495.400.872,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	194.956.600,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				194.956.600,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	194.956.600,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3	300.444.272,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				300.444.272,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3	300.444.272,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	95	100	1.117.091.022,00	100	1.221.882.000,00	100	1.223.882.000,00	100	1.225.882.000,00	100	1.225.882.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Guyangan	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				490.890.150,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3	300.461.200,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				300.461.200,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3	3	300.461.200,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	190.428.950,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				190.428.950,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	190.428.950,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				90.125.000,00		102.675.000,00		102.675.000,00		102.675.000,00		102.675.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	95	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	95	100	50.125.000,00	100	62.675.000,00	100	62.675.000,00	100	62.675.000,00	100	62.675.000,00		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				50.125.000,00		62.675.000,00		62.675.000,00		62.675.000,00		62.675.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	50.125.000,00	12	62.675.000,00	12	62.675.000,00	12	62.675.000,00	12	62.675.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.125.000,00		62.675.000,00		62.675.000,00		62.675.000,00		62.675.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	50.125.000,00	12	62.675.000,00	12	62.675.000,00	12	62.675.000,00	12	62.675.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				402.951.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bagor	Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	95	100	402.951.000,00	100	170.000.000,00	100	180.000.000,00	100	195.000.000,00	100	195.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Bagor	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				402.951.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	170	1.531	402.951.000,00	200	170.000.000,00	200	180.000.000,00	200	195.000.000,00	200	195.000.000,00		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				402.951.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	170	1.531	402.951.000,00	200	170.000.000,00	200	180.000.000,00	200	195.000.000,00	200	195.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				88.910.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelembagaan Desa di Kecamatan Bagor	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	95	100	45.660.000,00	100	50.415.000,00	100	50.415.000,00	100	50.415.000,00	100	50.415.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Bagor	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				88.910.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										ERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	21	21	45.660.000,00	21	50.415.000,00	21	50.415.000,00	21	50.415.000,00	21	50.415.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				45.660.000,00		50.415.000,00		50.415.000,00		50.415.000,00		50.415.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	21	21	45.660.000,00	21	50.415.000,00	21	50.415.000,00	21	50.415.000,00	21	50.415.000,00		
Meningkatnya Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Bagor	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	95	100	43.250.000,00	100	36.325.000,00	100	36.325.000,00	100	36.325.000,00	100	36.325.000,00		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				88.910.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		86.740.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	19	19	43.250.000,00	19	36.325.000,00	19	36.325.000,00	19	36.325.000,00	19	36.325.000,00		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				43.250.000,00		36.325.000,00		36.325.000,00		36.325.000,00		36.325.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	19	19	43.250.000,00	19	36.325.000,00	19	36.325.000,00	19	36.325.000,00	19	36.325.000,00		

4.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor				
1.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bagor	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Kedondong				
2.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Guyangan				
3			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	7.01.0.00.0.00.06.0000 – Kecamatan Bagor									
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	63,52	75	75	80	83	87	87	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	85,42	86	86	87	88	89	90	
4.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan	%	27	15	15	14	13	12	11	
5.	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	71	80	80	85	90	95	100	

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dengan didapatnya Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Bagor, maka terbentuklah IKK sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Sinergitas Kecamatan	Positif	Nilai	63,52	75	75	80	83	87	87	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Kecamatan Bagor.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001